

## 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu perangkat penting untuk menggenjot proses demokratisasi di Indonesia. Dalam meningkatkan kualitas Pemilu tentu harus memiliki landasan dalam proses pelaksanaannya, Pemilu memiliki beberapa landasan yaitu : landasan filosofis, sosiologis, politis, yuridis kultural, ekonomi, demokrasi.<sup>1</sup> Pemilu merupakan salah satu usaha untuk

---

<sup>1</sup> Landasan Filosofis pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan pemerintahan adalah fondasi dasar dari suatu negara demokrasi. Landasan Sosiologis pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maknanya adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Landasan Politis di dalam tradisi demokrasi, pemilu merupakan pra syarat untuk menyebut suatu negara sebagai negara demokrasi atau bukan. Pemilu yang terselenggara secara LUBER JURDIL merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Landasan Yuridis Berdasarkan UUD 1945 pemilu dilaksanakan untuk menata sistem kelembagaan negara berkaitan pula dengan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang MPR, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pasal 19 ayat (2) yang mengatur tentang susunan DPR, Pasal 22C ayat (4) yang mengatur susunan dan kedudukan DPD, dan Pasal 22E tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Landasan Kultural penyelenggaraan suatu pemilu harus tetap memperhatikan basis-basis budaya dalam masyarakat. Dalam Hal ini tuntutan budaya sebagai sesuatu yang hidup dan *genuine* dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan penyelenggaraan pemilu. Hal ini untuk menjaga stabilitas dan memurnikan budaya agar terus menjadi bagian yang tak bergeser dalam masyarakat meskipun pemilu silih berganti. Landasan Ekonomi pemilu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pencapaian demokrasi yang baik dapat diukur dari sejauhmana pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Semakin baik kondisi ekonomi masyarakat maka sikapnya terhadap demokrasi semakin baik yang akan berpengaruh pada pilihan politik yang bersangkutan. Landasan Demokrasi pemilu diciptakan sebagai alat (*a tools*) dan prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan merupakan Hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Rujuk Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jurdi Fajlurrahman(2018)).

mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relation*, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.<sup>2</sup>

Pemilihan umum sebagai sarana yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat ini menyiratkan bahwasanya pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat jugalah yang menentukan cara dan corak pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dengan sistem demokratis”.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud dan mekanisme demokrasi sebagai sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilihan adalah masyarakat di daerah. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus melaksanakan 3 (tiga) fungsi penting untuk mendapatkan substansi yang jelas. Pertama, memilih kepala daerah harus sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia bisa mewujudkan keinginan masyarakat di daerah. Kedua, dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di

---

<sup>2</sup> Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sengketa Pemilu kada di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 115.

daerah berdasarkan visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah. Ketiga, sebagai sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap calon kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari perkembangan demokrasi pasca reformasi di Indonesia, Pilkada merefleksikan perubahan paradigmatik dan kemajuan besar kepala daerah. Semenjak diselenggarakan pertama pada tahun 2005, mulai tahun 2015 Pilkada dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah. Pemilu yang tercatat secara baik dan demokratis nyatanya masih membelenggu masyarakat dengan adanya praktik patronase. Sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana halnya pola patronase yang terdapat dalam masyarakat Indonesia telah menghambat Pemilu dalam memenuhi tuntutan demokratisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan konsep patron-klien, dapat diketahui adanya patronase yang kuat dalam pemilihan calon kepala daerah, dimulai dari penyeleksian calon hingga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan yang muncul dari masyarakat harusnya berdasarkan pada kesadaran bukan ketertundukan sehingga berlanjut pada kontrol yang objektif terhadap urusan-urusan pemerintahan.<sup>4</sup>

Patron klien tumbuh subur di masyarakat yang memiliki permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks seperti minimnya sumber daya alam yang tersedia. Lapisan sosial masyarakat yang mengalami ini umumnya berada di

---

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 93.

<sup>4</sup> Almas G Haliya Putri Sjafrina. 2012. "Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah". *Jurnal Politik Muda*, 2(1) : 9-18.

kalangan nelayan, pedagang, dan petani. Di pedesaan atau pinggiran kota, bentuk hubungan antara patron (tuan) klien (pekerja), dengan cara memberikan bantuan terhadap keperluan klien misalnya memudahkan untuk memperoleh lapangan usaha, pinjaman untuk kebutuhan mendadak seperti; sakit, biaya pendidikan, dan konsumtif.<sup>5</sup> Klien menerima hal tersebut sebagai balas jasa, dengan berkomitmen untuk membantu patron dengan tenaga yang mereka miliki.

Hubungan patron klien bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Jika hubungan antara patron dan klien melemah karena tidak adanya jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan keamanan, akan terjadinya ketidakadilan dan tindakan eksploitatif yang dirasakan oleh klien. Dikarenakan hal tersebut, tidak mengherankan apabila ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya dalam memenuhi janji-janji ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Pada dasarnya hubungan ini akan bertahan lama jika masing-masing dari pihak menemukan kesesuaian dan manfaatnya.

Menurut Leo Agustino, kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya, dan balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiiaannya kepada sang patron.<sup>6</sup> Merujuk pendapat dan uraian di atas, patronase hadir karena adanya hubungan yang tidak setara tapi saling membutuhkan. Satu pihak, patron muncul sebagai sosok individu yang mempunyai kelebihan mulai dari kekayaan, status, maupun pengaruh. Di pihak lain, klien muncul sebagai anggota

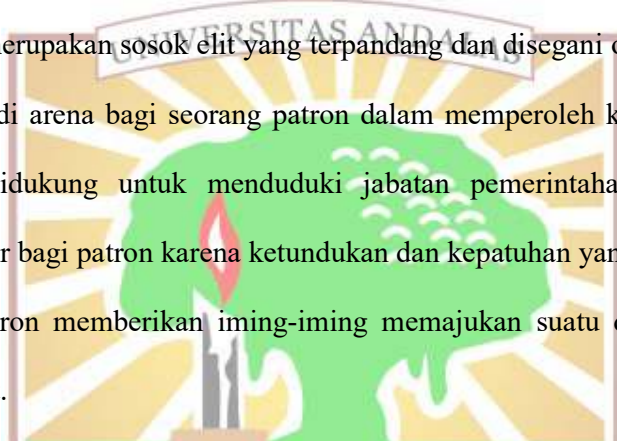
---

<sup>5</sup> James C. Scott. 1983. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 54-55.

<sup>6</sup> Leo Agustino. 2014. "Patronase Politik Era Reformasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi". *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2) : 69-85.

masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang dimiliki oleh seorang patron. Oleh sebab itu, hubungan dalam konteks tersebut berdasarkan adanya pertukaran kepentingan. Sehingga menimbulkan pernyataan bahwa, hubungan akan terjalin apabila kedua belah pihak memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.

Dalam pemilihan kepala daerah selama ini tidak terlepas dari pergulatan politisi yang merupakan sosok elit yang terpandang dan disegani oleh masyarakat. Pilkada menjadi arena bagi seorang patron dalam memperoleh kemenangan atas calon yang didukung untuk menduduki jabatan pemerintahan. Memberikan dukungan besar bagi patron karena ketundukan dan kepatuhan yang berujung pada dukungan. Patron memberikan iming-iming memajukan suatu daerah asal dari patron tersebut.



Edward Aspinall menjelaskan patronase sebagai distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal.<sup>7</sup> Selanjutnya menurut Shefter patronase merupakan pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, pekerja, dan para penggiat kampanye dengan tujuan mendapatkan dukungan politik mereka. Dalam hal ini patronase merupakan praktik pemberian uang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (misalnya pekerjaan atau kontrak proyek) yang diberikan oleh politisi, termasuk juga keuntungan yang

---

<sup>7</sup> Edward Aspinall. 2013. "A Nation In Fragments. Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia". *Critical Asian Studies*, 45(1) : 27-54.

ditujukan oleh individu (seperti amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok atau komunitas (seperti lapangan sepak bola di sebuah kampung untuk para pemuda). Selanjutnya patronase dapat berupa uang atau barang yang didistribusikan ke pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya pembelian suara) atau dari dana publik (seperti proyek-proyek *Pork Barrel Projects* yang dibiayai dengan dana pemerintah.<sup>8</sup>

Penelitian terkait patronase memberikan ketertarikan dalam dunia penelitian. Sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji bagaimana pelaksanaan dan hubungan yang dibentuk melalui patronase berpengaruh terhadap kemenangan kandidat. Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian dari; Rekha Adji Pratama, 2017; Sherly Atha Winanti, 2020; Muhammad Nurdiansyah, 2020 & Gentam Gemuruh dan Kiki Mikail, 2021. Pada dasarnya, beberapa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terbentuk akibat patronase yakni hubungan antara politisi, birokrat, dan masyarakat.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian mengenai patronase menarik bagi peneliti dari berbagai aspek terkait pelaksanaan patronase pada demokrasi lokal. Beberapa tahun belakang, fokus penelitian demokrasi lokal khususnya pada pelaksanaan Pilkada selalu diwarnai dengan praktik patronase, hal ini menjadi perhatian khusus bagi para peneliti terdahulu. Pada dasarnya strategi patronase dilakukan dengan cara memobilisasi massa untuk mendapatkan dukungan pada pemilihan.

---

<sup>8</sup> Edward Aspinall dan Mada Sukmajati.2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Polgov, Jakarta: Polgov. Hlm. 3

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjabarkan konsep patronase yang dilakukan oleh pasangan Hamsuardi dan Risnawanto yang maju sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2020. Merujuk pernyataan Liusman<sup>9</sup> ketua tim pemenangan HamRis (Hamsuardi-Risnawanto) dalam mencari suara dari partai politik antara tiga partai koalisi (PKS, PDIP, PAN), lebih banyak partai PAN yang bergerak untuk mencarikan suara dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Pasaman barat Tahun 2020:<sup>10</sup>

*“Untuk dukungan partai diantara nan tigo itu, labiah banyak yang mancarian suaro untuak Hamsuardi-Risnawanto oleh partai PAN. Inyiaik Baharuddin punyo strategi khusus dengan partainya yaitu menggerakkan Perempuan PAN biaso disapo (PUAN). PUAN banyak anggotanyo, di tiok kecamatan ado PUAN iko. PUAN banyak malakuan berbagai kegiatan ka masyarakat dan ajakan untuak mamilih pasangan Hamsuardi dan Risnawanto. (Untuk mendapatkan dukungan partai diantara yang tiga itu, lebih banyak mencari suara untuk Hamsuardi-Risnawanto oleh partai PAN. Inyiaik Baharuddin punya strategi khusus dengan partainya yaitu menggerakkan Perempuan PAN biasa dipanggil (PUAN). PUAN banyak anggotanya, di setiap kecamatan ada PUAN ini. PUAN banyak melakukan berbagai kegiatan ke masyarakat dan ajakan untuk memilih pasangan Hamsuardi dan Risnawanto)”*.

Peneliti berasumsi bahwa kemenangan pasangan Hamsuardi dan Risnawanto tidak terlepas dari aktor politik dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan praktik patronase. Oleh karenanya, kemenangan yang diperoleh Hamsuardi dan Risnawanto pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 melibatkan tokoh politik sebagai broker dalam melaksanakan patronase.

<sup>9</sup> Liusman merupakan ketua tim pemenang Hamsuardi-Risnawanto di Kabupaten Pasaman Barat. Beliau awalnya merupakan calon yang ingin dipasangkan dengan Hamsuardi karena beliau berasal dari partai Nasdem, yang suara partainya berkoalisi untuk mendukung pasangan nomor 4 Yulianto-Syafrial sehingga Liusman gagal untuk berpasangan dengan Hamsuardi. Kemudian untuk mencalonkan pasangan Hamsuardi tersebut tim memilih Risnawanto selaku ketua PDIPerjuangan Pasaman Barat. Pilihan tersebut dilakukan karena melihat *track record* Risnawanto yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2005-2010.

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan dengan Liusman selaku ketua tim pemenangan Hamsuardi-Risnawanto, yang bertempat di rumah informan, pada tanggal 8 Oktober 2021, pada pukul 13.28 WIB.

Terdapat praktik patron memberikan bantuan kepada kelompok atau masyarakat yang ada di tengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan kelompok agar terikat pada kandidat sehingga kelompok memiliki keterikatan dan memberikan dukungan kepada kandidat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik patronase dan strategi kampanye oleh kandidat bersama tokoh politik serta yang dilakukan pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020, menghasilkan pasangan Hamsuardi-Risnawanto sebagai pemenang kontestasi politik. Terdapat lima pasangan calon bupati/wakil bupati yang bertarung pada Pilkada di Kab. Pasaman Barat tersebut. Pertama, pasangan H. Hamsuardi, S. Ag dan H. Risnawanto, S.E yang diusung oleh partai PKS, PDIP, dan PAN. Kedua, pasangan H. Maryanto, SH, MM dan Ir. Yulisman, MM yang diusung oleh partai Gerindra dan PBB. Ketiga, H. Erick Hariyona dan Drs. H. Syawal yang diusung oleh partai Golkar, PPP, Perindo, dan PKB. Keempat, H. Yulianto, SH dan Syafrial, S.Pd yang diusung oleh partai Demokrat dan Nasdem. Kelima, H. Agus Susanto, SH, MH dan H. Rommy Candra merupakan calon perseorangan (independen).<sup>11</sup> Untuk melihat partai politik pengusung pasangan calon bisa dilihat tabel berikut.

<sup>11</sup> KPU. *Pilkada Pasaman Barat*. <https://kab-pasamanbarat.kpu.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 September Tahun 2021.



**Tabel 1.1**  
**Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	H. Hamsuardi, S. Ag dan H. Risnawanto, S.E	PKS, PDIP, PAN
2.	H. Maryanto, SH, MM dan Ir. Yulisman, MM	Gerindra, PBB
3.	H. Erick Hariyona dan Drs. H. Syawal	Golkar, PPP, Perindo, PKB
4.	H. Yulianto, SH dan Syafrial, S.Pd	Demokrat, Nasdem
5.	H. Agus Susanto, SH, MH dan H. Rommy Candra	Independen

Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat

Berdasarkan tabel di atas partai politik pengusung yang mendukung masing-masing calon pada Pilkada Pasaman Barat tahun 2020. Diperhatikan dengan seksama terdapat tiga partai politik yang mengusung pasangan calon Hamsuardi dan Risnawanto dalam menggapai kemenangan. Dari tiga partai politik tersebut terdapat aktor politik yakni Hamsuardi dari fraksi PKS, Risnawanto dari fraksi PDIP, dan Baharuddin selaku ketua DPD fraksi PAN sekaligus anggota DPRD. Baharuddin sebagai tokoh politik memberikan dukungan penuh kepada Hamsuardi-Risnawanto pada Pilkada. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua DPD PAN, Baharuddin yaitu:

“Berdasarkan konsolidasi serta restu dari daerah dan wilayah, SK dan pakta integritas dari DPP sudah diperoleh oleh pasangan calon tersebut, walau keduanya bukan dari kader PAN, namun semua sudah sesuai kajian sehingga PAN memutuskan untuk mendukung Hamsuardi-Risnawanto, dengan harapan mereka dapat menjadi pemimpin yang adil dan pro rakyat khususnya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Pasaman Barat”.<sup>12</sup>

Selanjutnya Baharuddin juga menyatakan:

<sup>12</sup> <http://matasumbar.com/partai-pan-resmi-dukung-pasangan-hamsuardi-risnawanto-pilkada-pasbar-2020/> Diakses Pada 4 Oktober 2021 Pukul 15.20 WIB.

"Hamsuardi dan Risnawanto selain dari kader parpol PKS dan PDIP juga telah berpengalaman di pemerintahan. Sehingga keduanya memiliki integritas yang tidak diragukan lagi, masyarakat Pasaman Barat sudah kenal dekat dengan keduanya. Dengan demikian Insya Allah keduanya jadi pemimpin yang kita harapkan bersama. Dan selain itu mereka dikenal disiplin dan merakyat".<sup>13</sup>

Selain itu, terdapat baliho yang merupakan strategi kampanye yang dilakukan oleh Hamsuardi dan Risnawanto bersama tokoh politik, narasi baliho tersebut bertuliskan "Koalisi Tiga Pilar Abadi, HamBaRis (Hamsuardi, Baharuddin, Risnawanto) siap membangun Pasaman Barat bersama rakyat".

**Gambar 1.1**  
**Hamsuardi (Kiri) Baharuddin (Tengah) Risnawanto (Kanan)**



*Sumber: Data Sekunder Peneliti*

Pemasangan baliho dan banner diperbolehkan untuk mengenalkan calon kepada pemilih hal ini disampaikan oleh ketua KPU Alharis:<sup>14</sup>

“Untuk kegiatan kampanye, kami telah memfasilitasi sesuai dengan dana dari pemerintah itu sendiri. Dari KPU memberikan lima buah baliho per kabupaten, spanduk per nagari, umbul-umbul dan stiker. Untuk desain alat peraga kampanye diserahkan kepada masing-masing calon. Penambahan alat peraga kampanye boleh dilakukan oleh pasangan calon dengan biaya

<sup>13</sup> <https://barometernews.id/akhirnya-pan-dukung-hamsuardi-risnawanto-untuk-maju-sebagai-pasangan-maju-pilkada-pasbar-2020/> Diakses Pada 4 Oktober 2021 Pukul 15.30 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Alharis selaku Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.15 WIB, di kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat

seratus persen dari mereka. Akan tetapi untuk fasilitas tersebut telah diatur dalam aturan KPU”.

Jika dilihat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di atas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut termasuk pelanggaran dalam kampanye, seperti yang disampaikan oleh Aditia:<sup>15</sup>

“Baliho dan spanduk yang bertebaran memang menarik perhatian masyarakat ketika masa kampanye. Akan tetapi terdapat beberapa alat peraga kampanye yang menyalahi aturan dalam penyebarannya, dan ini banyak kami temukan pelanggarannya. Seperti membuat baliho dan spanduk dengan menambahkan tokoh lain, tidak mencantumkan visi, misi, dan program. Tentu ini telah melanggar peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018”.<sup>16</sup>

Dapat dilihat tujuan pemasangan baliho dengan mencantumkan tokoh politik tersebut untuk menarik simpatisan masyarakat. Akan tetapi, dengan dicantumkannya tokoh politik pada baliho tersebut menyebabkan pelanggaran yang terjadi dalam proses kampanye. Penampilan tokoh politik bersamaan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati memperkuat indikasi peneliti bahwa adanya patronase yang terjadi.

Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan di daerah lainnya. Lima pasangan calon yang mengikuti kontestasi politik di Kabupaten Pasaman Barat memperebutkan sebanyak 262.654 suara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan Aditia anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga tanggal 8 Juni 2022 pukul 10.14 WIB, di kantor Bawaslu.

<sup>16</sup> Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dijelaskan tentang yang dimaksud APK. KPU menyatakan alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

sebanyak 130.431 pemilih laki-laki, dan 132.223 pemilih perempuan.<sup>17</sup> Sebelum pemilihan dilangsungkan, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat melakukan proses kampanye yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan visi dan misi mereka ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2021-2026. Tawaran serta kontrak sosial yang disampaikan masing-masing calon menjadi nilai jual sehingga masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memiliki pertimbangan untuk memilih mereka pada proses pemungutan hasil suara berlangsung. Dari proses pemilihan tersebut, didapatkan hasil perolehan suara masing-masing calon pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020:

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Suara Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020**

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1.	<b>H. Hamsuardi, S. Ag dan H. Risnawanto, S.E</b>	<b>56.555</b>	<b>31.5%</b>
2.	H. Maryanto, SH, MM dan Ir. Yulisman, MM	19.696	11.0%
3.	H. Erick Hariyona dan Drs. H. Syawal	26.406	14.7%
4.	H. Yulianto, SH, MM dan Syafrial, S.Pd	52.490	29.2%
5.	H. Agus Susanto, SH, MH dan H. Rommy Candra	24.469	13.6%

*Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat*

Dari hasil perolehan Pilkada serentak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dapat kita lihat bahwa pasangan H. Hamsuardi, S. Ag dan H. Risnawanto, S.E yang diusung oleh partai PKS, PDIP, dan PAN memperoleh suara terbanyak dengan

<sup>17</sup> <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/390453/kpu-pasaman-barat-dpt-pemilu-262654-jiwa>. Diakses pada tanggal 14 September Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB.

56.555 suara atau 31.5% jumlah suara sah pada Pilkada tersebut. Sedangkan pasangan yang menempati posisi nomor dua perolehan suara terbanyak adalah pasangan H. Yulianto, SH dan Syafrial, S.Pd dengan perolehan sebanyak 52.490 suara atau 29.2% suara sah. Posisi ketiga adalah pasangan H. Erick Hariyona dan Drs. H. Syawal, dengan perolehan suara 26.406 suara atau 14.7% suara sah. Posisi keempat adalah H. Agus Susanto, SH, MH dan H. Rommy Candra, dengan perolehan suara 24.469 atau 13.6% suara sah, dan posisi terakhir dengan perolehan suara 19.696 suara atau 11.0% suara sah adalah pasangan H. Maryanto, SH, MM dan Ir. Yulisman, MM.

**Tabel 1.3**  
**Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Hamsuardi dan Risnawanto</b>	<b>Maryanto dan Yulisman</b>	<b>Erick Hariyona dan Syawal</b>	<b>Yulianto dan Syafrial</b>	<b>Agus Susanto dan Rommy Candra</b>
Sungai Beremas	3.542	1.092	1.667	1.551	1.368
Lembah Melintang	7.536	1.337	2.929	3.856	5.294
Pasaman	9.793	3.426	3.679	10.913	2.839
Talamau	3.555	1.756	1.650	2.841	2.479
Kinali	5.726	3.962	4.159	12.007	1.868
Gunung Tuleh	3.378	1.635	1.351	3.533	1.903
Ranah Batahan	4.911	1.144	1.950	2.932	2.138
Koto Balingka	4.766	1.083	2.908	2.166	2.396
Sungai Aua	7.037	1.846	2.414	2.502	1.663
Luhak Nan Duo	4.931	1.601	2.349	8.577	1.460
Sasak Ranah Pasisie	1.476	825	1.220	1.618	835

*Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat*

Kemenangan yang diperoleh pasangan H. Hamsuardi, S. Ag dan H. Risnawanto, S.E dalam Pilkada serentak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 cukup mengejutkan. Hal ini dikarenakan H.Yulianto, SH yang merupakan *incumbent* berhasil disingkarkan dengan selisih suara sebanyak 4.065 suara. Kemudian, pesaing mereka terdapat wajah baru hingga politisi senior yang berhasil ditumbangkan. Pada beberapa daerah di Sumatera Barat banyaknya pasangan baru yang menyingkirkan nama-nama *incumbent* sebagaimana yang dilansir di media massa.

**Tabel 1.4**  
**Identitas Hamsuardi-Risnawanto**

Nama	Asal	Pengalaman Professional dan Organisasi
Hamsuardi	Sungai Aur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atlet Bola Volly PON Sumatera Utara (1982-1985)</li> <li>• Staff PNS Kabupaten Pasaman (1986)</li> <li>• Lurah Kabupaten Pasaman (1989-1995)</li> <li>• Camat Lubuk Sikaping (1999-2001)</li> <li>• Camat Pasaman (2001-2003)</li> <li>• Kepala Bidang Kehutanan Kabupaten Pasaman (2004-2006)</li> <li>• Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat (2006-2010)</li> <li>• Ikatan Remaja Muhammadiyah (1980-1981)</li> <li>• Pemuda Pancasila Kabupaten Pasaman (1992)</li> <li>• Pengurus KNPI Pasaman (1993-1996)</li> <li>• Sekretaris KONI Pasaman (1998-2003)</li> <li>• Manajer Tim Sepakbola Pasaman Barat Divisi II (2007)</li> </ul>

---

Risnawanto	Payakumbuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua PBVSI Pasaman Barat (2016-2018)</li> <li>• Wakil Bupati Pasaman Barat (2005-2010)</li> <li>• Anggota DPRD Pasaman Barat (2014-2015)</li> <li>• Ketua KONI Pasaman Barat (2005-2010)</li> <li>• Ketua Gapensi Pasaman Barat (2004-2008)</li> <li>• Ketua Gapensi Pasaman Barat (2008-2012)</li> <li>• Ketua FKPPi Pasaman Barat (2016-2020)</li> <li>• Ketua DPC PDIP Pasaman Barat (2005-2015)</li> </ul>
------------	------------	--

---

*Data diolah dari beberapa sumber*

Melihat *track and record* Hamsuardi dan Risnawanto di atas yang mana pasangan merupakan tokoh politik dan pemerintahan yang telah berkiprah di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, pasangan Hamsuardi dan Risnawanto membutuhkan dukungan dari berbagai elemen dan stakeholder. Salah satunya membangun koalisi bersama Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>18</sup> Dukungan tersebut salah satunya berupa bantuan yang dilakukan untuk mendapat simpatisan masyarakat seperti yang disampaikan oleh sekretaris Perempuan PAN Azli Melita:<sup>19</sup>

“Selain itu, kami juga melakukan pendataan kepada jorong-jorong terkait warga miskin, rumah yang tidak layak huni. Kemudian kami memberikan bantuan pakaian, sembako, uang, dan perbaikan rumah yang tidak layak huni. Dana itu biasanya diberikan oleh ketua PAN yaitu Inyiah Bahar. Anggota PUAN sekitar 1.500an orang, setiap agenda yang dilakukan salah

---

<sup>18</sup> Ketua DPD PAN saat itu adalah Drs. H. Baharuddin, R. MM. Ia merupakan tokoh partai politik, sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pasaman pada tahun 2000-2005, kemudian menjadi Bupati Pasaman Barat pada tahun 2010-2015. Sekarang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2025. Kemudian menjabat sebagai ketua KAN Nagari Talu.

<sup>19</sup> Wawancara dilakukan dengan Azli Melita selaku sekretaris PUAN Kabupaten Pasaman Barat tanggal 2 Juni 2022 pukul 11.20 WIB, di sekretariat PAN.

satunya untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Hamsuardi dan Risnawanto tersebut. Dari sana memang besar kontribusi yang kami berikan untuk kemenangan”.

Dengan mendapatkan dukungan dari partai PAN pasangan Hamsuardi dan Risnawanto dimudahkan dalam melakukan strategi berkampanye. Dikarenakan terdapat tokoh politik sebagai patron turut memberikan bantuan dalam mengkampanyekan calon secara masif dalam kemenangan Hamsuardi-Risnawanto. Hal ini sebagai kekuatan politik tambahan bagi kandidat yang telah dibangun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat selama kampanye dan dukungan politik masyarakat dalam proses pemilihan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap patronase politik yang dilakukan Hamsuardi-Risnawanto pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dengan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk patronase politik yang dilakukan oleh pasangan Hamsuardi-Risnawanto pada Pilkada di Pasaman Barat Tahun 2020?
2. Bagaimana struktur jaringan broker pasangan Hamsuardi dan Risnawanto dalam memenangkan Pilkada di Pasaman Barat Tahun 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk patronase politik Hamsuardi-Risnawanto yang dilakukan pada Pilkada di Pasaman Barat Tahun 2020.



2. Untuk menjelaskan struktur jaringan broker politik yang dilakukan Hamsuardi dan Risnawanto dalam memenangkan Pilkada di Pasaman Barat Tahun 2020.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi diri peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengenai patronase politik yang dilakukan pasangan calon dalam memenangkan Pilkada.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjelaskan mengenai patronase dan diharapkan menjadi wawasan baru bagi mahasiswa dalam tataran kehidupan mahasiswa.

